Realisasi PBB 2020 Sudah Tercapai Rp 19,4 M

YOGYA (KR) - Di tengah pandemi Covid-19, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogya sudah tercapai Rp 19,478 miliar. Setiap tahun, jatuh tempo pembayaran PBB selalu ditetapkan pada 30 September. Besaran tarif PBB tahun ini pun sempat menjadi sorotan akibat adanya penyesuaian.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, menjelaskan bagi wajib pajak PBB yang merasa keberatan diberikan opsi untuk mengajukan keringanan kepada walikota. "Sampai 30 Juni 2020 total ada 8.459 wajib pajak yang sudah mengajukan keringanan," jelasnya, Rabu (1/7).

Pada tahun anggaran 2020, BPKAD Kota Yogya menerbitkan 95.273 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Target pendapatan dari pajak bumi dan bangunan mencapai Rp 90 miliar. Target tersebut naik Rp 4 miliar dari realisasi PBB tahun 2019 lalu yang mencapai Rp 86 miliar.

Khusus tarif PBB tahun ini, Pemkot melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan itu salah satunya merupakan rekomendasi dari KPK karena sudah empat tahun belum pernah disesuaikan. Padahal, merujuk aturan, setiap tiga tahun seharusnya ada penyesuaian. "Dari sekitar 95 ribu wajib pajak, yang sudah membayarkan 22.738 wajib pajak. Total yang masuk sudah Rp 19,478 miliar," imbuh Wasesa.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut memberikan perpanjangan pengajuan keringanan PBB sampai sebulan ke depan atau akhir Agustus. Sesuai asumsi awal, SPPT PBB ditargetkan sudah terdistribusi ke penerima pada 31 Maret 2020. Dengan begitu batas akhir pengajuan keringanan ialah 30 Juni 2020. "Sudah kami perpanjang sampai Agustus. Proses pengajuan maupun untuk memberikan persetujuan butuh waktu. Sampai saat ini juga masih banyak berkas yang perlu saya tandatangani," katanya.

Selain pengajuan keringanan, pengurangan tarif PBB juga sudah dilakukan secara otomatis melalui pemberian stimulus. Besaran stimulus bervariasi, bagi ketetapan NJOP sampai Rp 500 juta, stimulusnya 70 persen. Kemudian di atas Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar diberikan stimulus 65 persen. NJOP di atas Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar stimulusnya 60 persen. NJOP antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar stimulusnya 55 persen. Sedangkan NJOP di atas Rp 5 miliar besaran stimulusnya 50 persen.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, mengapresiasi upaya perpanjangan pengajuan keringanan PBB tersebut. Menurutnya, dewan sudah memberikan rekomendasi agar tarif PBB tahun ini nilainya disamakan dengan tahun 2019. Rekomendasi diberikan seiring kejadian luar biasa dengan mewabahnya virus Korona yang berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat. **(Dhi)-f**

HUT KE-74 BHAYANGKARA

Sri Sultan Ikuti Upacara Virtual

YOGYA (KR) - Di tengah pandemi Covid-19, Korps Bhayangkara merayakan hari jadinya secara virtual. Demikian juga dengan Polda DIY yang menyelenggarakan upacara virtual di gedung Anton Sudjarwo Polda DIY, Rabu (1/7).

KR-Dok Humas Polda DIY.

Upacara peringatan Hari Bhayangkara yang digelar secara virtual di Mapolda DIY, kemarin.

Bertindak selaku inspektur upacara, Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan dari istana negara dengan diikuti secara virtual di seluruh jajaran Polri. Di Polda DIY, kegiatan dipimpin Kapolda DIY Irjen Pol Drs Asep Suhendar MSi, yang dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Forkompimda, Wakapolda dan pejabat utama Polda DIY.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK MSc menerangkan, upacara dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan dibatasi jumlah personel yang mengikuti. Acara dilanjutkan dengan tasyakuran yang dilaksanakan secara *live streaming* dari Bareskrim Polri.

Dikatakan Kabid Humas, sesuai surat telegram Kapolri, ada dua Polres se-Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan interaksi langsung dengan Presiden, salah satunya Polres Gunungkidul. "Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami," ucapnya.

Saat menyapa Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setiawan, Presiden menanyakan situasi dan kondisi di Gunungkidul, terutama terkait pengendalian Covid-19 di wilayah tersebut. **(Ayu)-f**

LAYANAN 'DRIVE THRU' E-KTP LANGSUNG DISERBU

Dinilai Efektif, Pemkot Wacanakan Tambah Armada

YOGYA (KR) - Uji coba layanan *drive thru* pencetakan KTP elektronik atau e-KTP, Rabu (1/7), mendapat respons positif. Pemkot Yogya bahkan mewacanakan untuk menambah armada mobil keliling karena dinilai efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KR-Ardhi Wahdan

Heroe Poerwadi menyapa sekaligus secara simbolis menyerahkan e-KTP kepada warga dalam layanan drive thru.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut *drive thru* pencetakan e-KTP tersebut digulirkan karena merupakan yang paling banyak diakses oleh masyarakat. "Sehari rata-rata ada sekitar 180 pencetakan KTP elektronik akibat hilang atau rusak. Jika harus dilayani di kantor, maka bisa mengakibatkan penumpukan. Makanya layanan ini coba kami hadirkan," jelasnya di sela pelayanan di kompleks Balaikota Yogya, kemarin.

Layanan pencetakan e-KTP secara *drive thru* tersebut hanya berlaku bagi kartu yang hilang dan rusak. Sedangkan pencetakan yang diawali dengan perekaman data serta perubahan data kependudukan, harus tetap dilayani di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya. Syarat utama ialah membawa kartu keluarga asli. Bagi e-KTP yang rusak, maka kartunya juga harus diserahkan, dan yang hilang melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.

Heroe mengaku, pihaknya baru memiliki satu unit mobil keliling untuk layanan kependudukan. Dengan tingginya minat masyarakat, pihaknya pun akan mengupayakan penambahan armada. Hal ini menjadi bagian dari perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan.

"Sekarang pencetakan yang berbasis kertas seperti kartu keluarga, akta kelahiran, maupun surat mutasi sudah bisa dicetak dari rumah. Kalau KTP elektronik karena harus dengan blangko khusus maka tidak bisa dicetak dari rumah," jelasnya.

Sementara Kepala Dindukcapil Kota Yogya Lucy Irawati, mengatakan layanan *drive thru* tersebut akan digulirkan tiga kali dalam sepekan yakni setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 09.00 hingga 12.30 WIB. Lokasi sengaja digelar di kompleks Balaikota Yogya supaya antrean kendaraan tidak mengganggu akses lalu lintas. Akan tetapi pihaknya juga berupaya mencari lokasi lain seiring masukan yang ia terima.

"Sekarang karena armadanya baru satu unit maka ke depan kami coba menambah petugas. Kemudian kami juga masih koordinasi dengan Dinas Perhubungan serta Polresta untuk mengkaji tempat lain yang cukup mudah diakses namun tidak mengganggu lalu lintas," katanya.

Selain layanan *drive thru* pencetakan e-KTP serta cetak kependudukan berbasis kertas dari rumah, Lucy mengaku pihaknya juga tengah mengembangkan satu 'QR Code' untuk mengakses semua jenis layanan kependudukan. Melalui kode khusus itu nantinya pemohon bisa semakin mudah untuk mencetak dokumen yang dibutuhkan.

Sementara itu, durasi waktu untuk melayani setiap pemohon pencetakan e-KTP rata-rata mencapai tiga menit. Pemohon juga langsung menyerbu layanan tersebut. Dari perkiraan awal mampu melayani 70 pemohon, namun ternyata terdapat 135 pemohon. Meski layanan tergolong cepat namun antrean pemohon cukup panjang. Sehingga waktu yang dibutuhkan pemohon sejak mengantre hingga bisa memperoleh e-KTP baru mencapai sekitar 30 menit. **(Dhi)-f**

PROTOKOL PENYELENGGARAAN IDUL ADHA DIMATANGKAN

Pemkot Wajibkan Hewan Kurban 'Diguyang'

YOGYA (KR) - Penjualan hewan kurban menjadi salah satu perhatian serius Pemkot Yogya. Hal ini seiring potensi penularan virus Korona karena lalu lintas hewan dari luar daerah bakal meningkat. Setiap hewan kurban yang datang pun wajib *diguyang* (dimandikan) guna menjaga kebersihan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku kewajiban memandikan hewan kurban yang dijual di pasar tiban akan diatur dalam protokol penyelenggaraan Idul Adha. "Saat ini protokol tersebut sedang kami matangkan. Kami berkaca pada klaster pedagang ikan," katanya, Rabu (1/7).

Diakuinya, sebagian besar hewan kurban di Kota Yogya harus didatangkan dari luar daerah. Di antaranya Gunungkidul, Kulonprogo maupun Bantul. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga didatangkan dari luar DIY. Oleh karena itu, selain surat keterangan sehat, kebersihan hewan yang masuk juga harus dijamin. Sehingga begitu hendak dibawa ke Kota Yogya harus dimandikan terlebih dahulu. Begitu pula ketika sampai di Yogya juga harus dimandikan kembali. Tidak hanya kondisi hewan, melainkan tali yang digunakan juga wajib disterilisasi.

Heroe menambahkan, organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah sudah menerbitkan imbauan Idul Adha pada masa pandemi. Di antaranya mengalihkan sohibul kurban dengan sedekah, kemudian bagi yang tetap akan berkurban hewannya dapat diserahkan ke Baznas.

Di samping itu, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwangan yang dimiliki Kota Yogya akan dioptimalkan. Hanya, Heroe mengakui kapasitas pemotongan di RPH Giwangan sangat terbatas. Dalam tiga hari penyembelihan, kemampuannya hanya mampu menyembelih mencapai 150 ekor.

"Ini perlu ada penanganan khusus karena merujuk tahun lalu panitia penyembelihan di masyarakat mencapai sekitar 440 tempat. Makanya setiap panitia di masyarakat harus ada satgasnya. Sehingga diawasi betul bagaimana hewan itu datang, disembelih sampai dibagikan ke masyarakat dengan mempertimbangkan protokol," paparnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sugeng Darmanto, sebelumnya mengatakan aturan penyembelihan hewan kurban secara umum sudah dituangkan dalam surat edaran Kementerian Pertanian. Edaran itu pun menjadi dasar penyusunan protokol di tingkat Kota Yogya. Salah satu anjurannya ialah penyembelihan diarahkan melalu RPH. Akan tetapi, kapasitas RPH sangat terbatas sehingga perlu ada antisipasi.

Terkait penjualan hewan kurban di pasar tiban, Sugeng menjelaskan, harus ada persetujuan atau izin dari wilayah, terutama aparatur di kecamatan dan kelurahan. Sistem penjualannya pun diimbau menggunakan daring guna menghindari kerumunan. "Tetap akan ada pengawasan di pasar tiban. Kami akan melihat aspek perijinannya, sistem penjualannya, kesehatan hewan serta ada atau tidaknya kerumunan masyarakat di sana," terangnya. **(Dhi)-f**

FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD DIY

Pertanyakan Pasca Masa Tanggap Darurat

YOGYA (KR) - Keputusan Pemda DIY yang memperpanjang masa tanggap darurat penanganan Covid-19 hingga 31 Juli, menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pasalnya, salah satu yang dijadikan alasan keputusan tersebut adalah ketidakpatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan. "Kebijakan ini jelas membuat masyarakat bertanya-tanya, bagaimana menyangkut kelangsungan hidup mereka. Termasuk jika masa tanggap darurat benar-benar berakhir 31 Juli nanti," ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY RB Dwi Wahyu, Rabu (1/7).

Selama perpanjangan masa tanggap darurat ini, menurut Dwi telah berimbas pada seluruh sektor kehidupan. Dan yang menjadi pertanyaan, setelah 31 Juli itu masyarakat harus melakukan kegiatan apa, termasuk aktivitas pendidikan (sekolah) hingga perekonomian. "SOP belum maksimal tersosialisasi pada masyarakat. Tapi di lapangan banyak masyarakat bersepeda. Sampai *Ngarsa Dalem* 'marah'," ungkapnya.

Untuk itu Dwi mendesak agar Pemda DIY memiliki konsep jelas dalam penanganan Covid-19. Terutama mempersiapkan masa normal baru. Penanganan dampak ekonomi pada masyarakat juga tidak boleh lagi bertumpu pada bantuan sosial (bansos) saja. Namun harus mengarah bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat. **(Awh)-f**

Koramil Kirim Tumpeng ke Polsek

KR-Juvintarto

Danramil memberikan ucapan HUT Bhayangkara pada Kapolsek Pakualaman dengan tumpengan.

YOGYA (KR) - Bertepatan HUT ke-74 Bhayangkara, Koramil 05 Pakualaman Kodim 0734/Yk memberikan ucapan selamat pada Polsek Pakualaman, Rabu (1/7) dengan membawa tumpeng. Suasana akrab dan kekeluargaan terasa dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan ini menunjukkan kekompakan dan soliditas Koramil-Polsek untuk mengamankan NKRI dengan kerja sama yang baik saling membantu dalam tugas," tegas Danramil 05 Pakualaman Kapten Inf Surono yang datang bersama anggota.

Kapolsek Pakualaman Kompol Aslori beserta anggota menyambut hangat dan menegaskan sinergitas TNI-Polri terus terjaga dalam melayani masyarakat. **(R-4)-f**

FAKULTAS
PSIKOLOGI &
ILMU SOSIAL BUDAYA

Innalillahi wa innailaihi roji'un

Pimpinan beserta segenap keluarga besar civitas akademika
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB)
Universitas Islam Indonesia (UII)
Turut berduka cita atas meninggalnya :

(Almh.) Dr. Sukarti

(Dekan Fakultas Psikologi UII Periode 2001-2006)
(Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya UII Periode 2004-2006)

Yang meninggal pada hari Selasa, 30 Juni 2020 Pkl. 08.15 WIB
Jenazah telah dimakamkan di Basen, Kotagede Yogyakarta

Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan mengampuni kesalahannya. Untuk keluarga yang ditinggalkan semoga senantiasa diberi keikhlasan dan kesabaran

Aamiin.. Yaa Robbal 'Alamiin.

Ttd.

Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M. Si., M.Ag., Psikolog
Dekan FPSB UII

P E N G U M U M A N
(Tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti)
Nomor : HP.02.02/472-33.28/VI/2020

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang berdasarkan Pasal 57-60 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama Pemohon	Jenis & nomor hak	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah Desa / Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	SULASTRI	M.922	SOMA ayah SIWEN	28-04-1982	KAMBANGAN, LEBAKSIU
2.	GUBUG SUNTOPO	M.911	GUBUG SUNTOPO suami SUMARTI	09-07-2002	KEDUNGKELOR, WARUREJO
3.	RATONI	M.879	RATONI suami SUDIRAH	19-01-1994	PENARUKAN, ADIWERNA
4.	KARDI SUAMI TASRIPAH	M.350	SUMITI	09-09-1983	PEDAGANGAN, DUKUHWARU
5.	HERRY PURNAWAN	M.128	HAJI KAMBALI	29-08-1977	PEKAUMAN KULON, DUKUHTURI
6.	AMALIA RACHMAN	M.88	SARPI	12-07-2002	HARJASARI LOR, ADIWERNA
7.	SITI MUCHLISOH	M.551	NITI	18-09-1974	PAMIRITAN, BALAPULANG
8.	RONI	M.356	SUKIRMAN suami ENAH	14-12-1989	KEDUNGKELOR, WARUREJO
9.	SAADAH	M.233	DAYAT SAADAH	24-09-1974	MINDAKA, TARUB
10	ALI MURTADO	M.45	1. HAJI KAMANG 2. DIMURI	25-10-2001	HARJASARI KIDUL, ADIWERNA
11	ROISAH	M.230	ROISAH istri DARDJO	17-10-1994	KEDOKANSAYANG, TARUB
12	SOLEH	M.1139	SOLEH	02-05-2000	MUNJUNGAGUNG, KRAMAT
13	KHUSWATUN KHASANAH	M.155	KHUSWATUN KHASANAH	18-01-1993	KEDOKANSAYANG, TARUB

Jika selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan ini tidak ada orang keberatan terhadap permohonan pengganti sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, selanjutnya sertipikat yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Slawi, 30 Juni 2020
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
Ttd.
MUHAMAD FADHIL, SH. MH
NIP. 1966 10071989031001